

DAFTAR BACAAN

Buku

- Agustine, Oly Viana, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Army, Eddy, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*, Binacipta, Bandung, 1996.
- Bemmelen, J.M. van., *Strafvordering, Leerboek van het Ned, Strafprocesrecht*, Martinus Nijhoft, 's-Gravenhage, 1950.
- Djamali, Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Presda, Jakarta, 2010.
- Effendy, Marwan, *Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana)*, Referensi, Jakarta Selatan, 2012.
- Hadjon, Philipus M., et all., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- _____, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hiariej, Eddy O. S, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2017.
- Lamintang, P.A.F., *KUHAP dengan Pembaharuan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984.

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Panggabean, Henry P., *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
- Poernomo, Bambang, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakkan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Prodjodikoro, Wiryono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1967.
- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015.
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV. Armico, Bandung, 1985.
- Syarifuddin, Muhammad, *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal*, Imaji Cipta Karya, Jakarta, 2020.
- Wisnubroto, Aloysius, G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Jurnal

- Ahmad, Kamri dan Hardianto Djanggih, 'Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol 24, Issue 3, 2017.
- Aiswarya, I Dewa Bagus Dhanan dan Putu Gede Arya Sumerthayasa, 'Penerapan Prinsip Miranda Rule Sebagai Penjamin Hak Tersangka Dalam Praktik Peradilan Pidana Di Indonesia', *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol 5, No 6, 2016. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/24805>, diakses pada tanggal 11 November 2020.
- Boyoh, Marsyelina, 'Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil', *Jurnal Lex Crimen*, Vol IV, No 4, 2015.
- Brata, Desak Paramita, et all., 'Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana', *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol 3, No 1, 2020. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28837>, diakses pada tanggal 4 Desember 2020.

- Cahyadi, Irwan Adi, 'Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum (Sarjana Ilmu Hukum)*, Juni 2014.
- Falasifah, Umi, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta 'Tinjauan Tentang Pembaharuan KUHAP Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Diponegoro Law Journal*, Vol 5, No 3, 2016.
- Fuady, Munir, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h 92-94 dalam Zayanti Mandasari, 'Kedudukan Memorandum of Understanding dan Surat Keputusan Bersama Ditinjau dari Teori Perundang-Undangan', *Jurnal Hukum Ius Quia iustum*, Vol 20, No. 2, April 2013.
- Harianja, Suriady, 'Peradilan In Absentia Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif HAM Terdakwa', *Unnes Law Journal*, Vol 2 No 1, 2013.
- Listiyanto, Apri, 'Pembaharuan Sistem Hukum Acara Pidana', *Jurnal RechstVinding*, 2017.
- Lontokan, Raymond, 'Proses Penanganan Tindak Pidana Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana', *Jurnal Lex et Societatis*, Vol 5, No 2, 2017.
- Maharani, Cyntia Citra, Fitri Amelia, 'Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding Dalam Sistem Hukum Kontrak', *Jurnal Private Law*, Vol 2, No 4, April 2014.
- Mandasari, Zayanti, 'Kedudukan Memorandum of Understanding dan Surat Keputusan Bersama Ditinjau dari Teori Perundang-Undangan', *Jurnal Hukum Ius Quia iustum*, Vol 20, No. 2, April 2013.
- Nalle, Victor Imanuel W., 'Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan Kebijakan', *Jurnal Yudisial*, Vol 6, No 1, April 2013.
- Nugroho, Dewi Rahmaningsih dan S. Suteki, 'Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 2, No 3, 2020.
- Pamungkas, Ageng Priambodo, 'Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum Dalam Tindak Pidana Perjudian Sebagai Kejahatan Kesusilaan', *Jurnal Idea Hukum*, Vol 3, No 2, 2017.
- Pratama, Gita Nanda, 'Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia', *Veritas Et Justitia*, Vol 2, No. 2, April 2016.

- Rustamaji, Muchammad, 'Pembaharuan Hukum Acara Pidana Melalui Telaah Sisi Kemanusiaan Aparat Penegak Hukum', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 19, No 1, 2017.
- Satory, Agus dan Hotma Pardomuan Sibuea, 'Problematika Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan', *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol 6, No 1, 2020.
- Sholikin, Nur, 'Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)', *Jurnal Rechtstvinding*, 2017.
- Siregar, Ruth Marina Damayanti, 'Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana', *Jurnal Jurisprudence*, Vol 5, No 1, 2015.
- Tahir, Heri dan Dian Eka Safitri, 'Kedudukan Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Barru', *Jurnal Supremasi*, Vol XII, No 1, 2018.

Skripsi

- Nasution, Ihsan Badruni, *Pengujian Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Di Mahkamah Agung*, Skripsi, Program Double Degree Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.
- Shalihah, Septiana Anifatius, *Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.

Internet

- Baihaqi, Amir, "PN Surabaya Sebut Sidang Teleconference Langgar KUHAP, Tapi", *Detiknews (online)*, 30 Maret 2020, www.news.detik.com, Dikunjungi pada tanggal 20 Mei 2020.
- CNN Indonesia, "Jerinx Walkout dari Persidangan Kasus IDI Kacung WHO", www.cnnindonesia.com, 10 September 2020, Dikunjungi pada tanggal 5 Desember 2020.
- Huzaini, Moh. Dani Pratama, "Cerita Implementasi Sidang Perkara Pidana Secara Online di Pengadilan Negeri", www.hukumonline.com, 26 March 2020, Dikunjungi pada tanggal 5 Desember 2020.
- Mardatillah, Aida, "Begini Prosedur Persidangan Perkara Pidana Secara Online", www.hukumonline.com, 8 Oktober 2020, Dikunjungi pada tanggal 19 Oktober 2020.

_____, “Melihat Draft Perma Sidang Online Pidana Online yang Bakal Disahkan”, www.hukumonline.com, 12 Agustus 2020, Dikunjungi pada tanggal 29 Agustus 2020.

_____, “Sidang Pidana Online Dinilai Sulit Menemukan Kebenaran Materiil”, www.hukumonline.com, 12 Juni 2020, Dikunjungi pada tanggal 13 November 2020.

Oktavira, Bernadetha Aurelia, “Tata Cara Sidang Pidana Secara Elektronik”, www.hukumonline.com, 26 Oktober 2020, Dikunjungi pada tanggal 16 November 2020.

Pramesti, Tri Jata Ayu, “Tempat Kejadian Perkara, Daerah Hukum Polisi, dan Kewenangan Relatif Pengadilan”, www.hukumonline.com, 27 September 2013, Dikunjungi pada tanggal 10 Desember 2020.

World Health Organization (WHO), “Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public”, www.who.int, 29 April 2020, Dikunjungi pada tanggal 20 Mei 2020.

Lain - Lain

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Perjanjian Kerjasama Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, KEP-17/E/EJP/04/2020, PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengesuaian Sistem Kerja Hakim Dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan RI.

Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-OT.02.02-16 Tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah

(*Work From Home*) dengan Adanya Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1980 Tentang Peninjauan Kembali Putusan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Seminar

Ma'Arif, Syaiful, Advokat Dalam Menghadapi Sidang Pidana Secara Online, Pemaparan Materi oleh Wakil Sekjen DPN PERADI Pusat dalam Seminar Nasional dengan tema “Persidangan Online di Kala Pandemi Susah Sinyal: Bagaimana Kesiapan Peradilan Indonesia?”, Surabaya, 7 November 2020.

Suhadi, Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di Pengadilan, Pemaparan Materi oleh Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Seminar Nasional dengan tema “Dampak dan Tantangan Penegakan Hukum di Masa Pandemi Covid-19”, Jakarta, 19 September 2020.

Teguh, Pri Pambudi, Pelayanan Terhadap Pencari Keadilan Di Era New Normal Melalui Persidangan Online, Pemaparan Materi oleh Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Seminar Nasional dengan tema “Persidangan Online di Kala Pandemi Susah Sinyal: Bagaimana Kesiapan Peradilan Indonesia?”, Surabaya, 7 November 2020.

Wawancara

Rohman, Lutchas, Koordinator Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Sidoarjo, 30 November, 2020.

Yulihadi, Moch, Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, Sidoarjo Indonesia, 10 Agustus 2020.